



Pemkot Kaji Penerapan UMSK

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tengah mengkaji penerapan upah minimum sektoral kota (UMSK) untuk diterapkan di wilayah ini. Rencana awal ini masih dalam tahap pembahasan dan proses pengkajian yang komprehensif sehingga memerlukan waktu.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogya, Lucy Irawati menjelaskan,

● ke halaman 15

Kajiannya sudah kami anggarakan pada tahun ini dan nanti kami lihat daerah lain soal upah sektoral itu bagaimana.

Pemkot Kaji Penerapan

● Sambungan Hal 9

UMSK itu nantinya bakal diterapkan pada sektor pariwisata. Bukan tanpa sebab, dengan predikat kota wisata yang dipegang serta maraknya pelayanan jasa pada bidang tersebut membuat UMSK dinilai perlu untuk diterapkan.

"Kajiannya sudah kami anggarakan pada tahun ini dan nanti kami lihat daerah lain soal upah sektoral itu bagaimana," kata Lucy, Jumat (17/1).

Dijelaskannya, instansi bakal menggandeng serta Apindo dan perwakilan serikat buruh untuk melakukan pengkajian UMSK secara tepat. Dari hasil itu, nantinya diharapkan akan dapat satu kesimpulan yang jelas tentang penentuan UMSK.

Namun begitu, Lucy masih belum memaparkan secara rinci sektor wisata

seperti apa saja yang nantinya bakal ikut masuk dan menerapkan UMSK. Menurut dia, hal ini masih tahapan awal sehingga masih diperlukan panduan serta petunjuk daerah lain yang telah menerapkan sistem tersebut sebagai percontohan.

"Kami dari pemerintah akan mengawal dulu. Pas-dnya akan melihat juga dari daerah lain seperti apa. Semisal di Bandung itu sudah pakai UMSK, nanti kami berusaha mencari masukan ke sana," imbuhnya.

Lebih lanjut dia menyatakan, dalam UMSK nantinya kesepakatan akan dilakukan antara pihak asosiasi pengusaha dan serikat pekerja pada sektor yang bersangkutan. Pembahasan pun bakal dilakukan secara bertahap dan Pemkot hanya sebatas mengusulkan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti.

"Yang jelas kami sudah melakukan kesepakatan dengan DPRD untuk melakukan langkah-langkah menuju ke sana," imbuh dia.

Sementara, anggota Komisi D DPRD Kota Yogya, Ali Fahmi mendukung penerapan UMSK untuk diterapkan di wilayah setempat. Meskipun UMK Kota Yogya merupakan yang tertinggi di DIY, namun lewat implementasi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas industri pariwisata setempat.

"Kami mendukung tapi yang melakukan kajian itu bagian eksekutif. Tentu harapannya sektor pariwisata bisa meningkat seiring dengan penerapan UMSK," pungkash dia.

Perlu diketahui upah minimum kota Yogyakarta tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp2.004.000. Nilai tersebut naik sebesar Rp157.600 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.846.400.

Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) meminta pemerintah daerah (Pemda) DIY untuk mengejar kenaikan upah minimum sektoral. Hal ini menjadi salah satu hal untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dan rasio gini.

Sangat Penting

Sementara itu, Sekretaris Jendral (Sekjend) ABY DIY, Kurnadi menjelaskan, pihaknya meminta agar upah sektoral harus naik signifikan untuk mengejar ketertinggalan UMR dari daerah lain. Hal ini karena pertumbuhan wisata dan perhotelan di DIY sangat signifikan.

"Kalau Upah Minimum Sektoral tinggi maka pertumbuhan ekonomi di DIY juga akan sangat bagus," kata Kurnadi.

Kurnadi juga mengatakan, Upah Minimum Sektoral sangat penting bagi Yogyakarta. Tanpa kebijakan itu, ujarnya, indeks rasio gini dan kemiskinan jadi langganan. "Gapnya makin tinggi karena adanya kesenjangan upah buruh yang rendah," jelasnya. (jst)

Penting untuk Tingkatkan Kesejahteraan

PENGAMAT Ketenagakerjaan, Hempri Suyatna mengapresiasi upaya Pemkot Yogyakarta yang akan melakukan kajian terhadap penerapan UMSK di wilayah setempat. Dia menyatakan, dengan penerapan UMSK ini akan dapat meningkatkan kualitas

pariwisata Yogyakarta.

Dia mengatakan, UMSK sebenarnya merupakan hal lama yang telah didorong pihaknya untuk diterapkan. Hal ini dimungkinkan karena Yogyakarta bukan me-

● ke halaman 15

Penting Untuk Tingkatkan

● Sambungan Hal 9

upakan daerah industri melainkan condong kepada sektor wisata. Sehingga perlu sistem upah alternatif lain yang diberlakukan

kepada pekerja.

"Itu sangat bagus kalau diterapkan. Ini juga penting untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku wisata di Yogyakarta," kata Hempri, Jumat (17/1).

Meski begitu, Hempri menyebut dalam melakukan pengkajian UMSK, Pemkot mesti bertumpu dan me-

nyerap pada semua aspirasi pekerja, sehingga dapat mengakomodir semua kepentingan pelaku pariwisata.

"Karena kan banyak jenis dan aneka ragamnya ini sektor pariwisata. Kemudian UMSK yang akan diterapkan itu juga benar-benar dari kondisi riil pekerja," ujarnya.

Di sisi lain, dia menilai ka-

rakteristik pariwisata di wilayah Yogyakarta tidak semua sama. Maka itu diperlukan solusi yang ideal dalam menetapkan kebijakan itu.

"Saya kira maksudnya bukan kepada mematikan ya tapi lebih kepada memajukan dan membuat industri pariwisata menjadi berkembang," urainya. (jsf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005